

RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 - 2024

REVISI
NOVEMBER
20
23

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar tahun 2020-2024 Revisi ke-4 November 2023 ini dapat diselesaikan.

RAK Revisi ini dibuat karena adanya revisi terhadap Perjanjian Kinerja yaitu penambahan indikator. Dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya ke depan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 Revisi ke-4 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 Revisi ke-4 November 2023 ini.

Makassar, November 2023

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Makassar,



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP. 196908221993031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Tantangan	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	5
BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	8
A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan Strategis.....	9
C. Sasaran Strategis	10
D. Indikator Kinerja	11
E. Arah Kebijakan dan Strategi	14
BAB III Rencana Aksi Kegiatan	18
A. Kerangka Logis	18
B. Rencana Kegiatan	19
C. Kerangka Kelembagaan	26
D. Kerangka Regulasi	28
E. Kerangka Pendanaan	30
BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Program	32
A. Pemantauan	32
B. Evaluasi	32
C. Pengendalian Program	33
BAB V Penutup	34
Lampiran	35

DAFTAR TABEL

Tabel	II.1	Indikator KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi November 2023	11
Tabel	III.1	Target Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 sd 2024	19
Tabel	III.2	Kerangka Pendanaan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 sd 2024	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Analisa Crosscutting KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	7
Gambar III.1	Kerangka Logis Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	18
Gambar III.2	Diagram Cascading IKP dan IKK KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	19
Gambar III.3	Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi berkala atas Sistem Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Jenderal merupakan hal-hal yang melandasi adanya revisi pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, begitupun rencana aksi kerja Unit Pelaksana Teknis dibawahnya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berpengaruh terhadap semua sektor kehidupan dan sampai saat ini status pandemi belum dicabut oleh WHO. Menyikapi hal tersebut dan kemungkinan adanya penyakit lain yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD), sehingga Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2022-2024 diperlukan penetapan strategi, kebijakan dan indikator kinerja yang sinergis dalam deteksi faktor risiko dalam cegah tengkal penyakit di Pintu Masuk Negara.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 Revisi September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala KKP Kelas I Makassar selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian kinerja tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun 7 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara dengan target bernilai 1, realisasi bernilai 1, sehingga capaian menjadi 100%;
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 100%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 100%;
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan target bernilai 0,96, realisasi 0,89, sehingga capaian menjadi 92,71%;
4. Nilai kinerja anggaran dengan target 85, realisasi 91,26, serta capaian sebesar 107,36%;
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan terget 93, realisasi 87,32, dengan capaian sebesar 93,89%;

6. Kinerja implementasi WBK satker dengan target nilai 81, realisasi 81,46, serta capaian sebesar 100,57%;
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 80%, realisasi 93,85%, serta capaian sebesar 117,31%.

Capaian tertinggi terdapat pada indikator 7 yaitu persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan besaran capaian 117,31%. Sehingga rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 101,69%.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan KKP Kelas I Makassar tahun 2022 bersumber dari pagu sebesar Rp. 37.268.131.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.730.982.190,- atau sebesar 90,51%.

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2023 sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang ASN berdasarkan DUK Desember 2023 yang terdiri dari 125 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 2 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) dan ditambah tenaga Non ASN berdasarkan data RKAKL 2023 yakni satpam sebanyak 7 orang, sopir sebanyak 13 orang, cleaning service sebanyak 9 orang, dan pramubakti sebanyak 6 orang.

1. Menurut Jabatan :

a) ASN	=	127 orang
1) Jabatan Struktural	=	2 orang
2) Jabatan Fungsional Teknis	=	84 orang
3) Jabatan Fungsional Administrasi	=	12 orang
4) Jabatan Pelaksana Teknis	=	23 orang
5) Jabatan Pelaksana Administrasi	=	7 orang
b) Non ASN	=	35 orang
1) Pengamanan Kantor (Satpam)	=	7 orang
2) Pengemudi (Sopir)	=	13 orang
3) Cleaning Service	=	9 orang
4) Pramubakti	=	6 orang

2. Menurut Golongan :

a) Golongan II	=	18 orang
----------------	---	----------

- b) Golongan III = 91 orang
- c) Golongan IV = 21 orang

3. Menurut Pendidikan :

- a) S2 = 24 orang
- b) S1 = 65 orang
- c) DIV = 6 orang
- d) DIII = 32 orang
- e) SMA = 3 orang

B. Potensi dan Tantangan

Analisis potensi dan tantangan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

1. *Strenght* (Kekuatan)

- a. Sumber daya manusia yang produktif, karena ASN KKP Kelas I Makassar rata-rata masih berusia muda dan tingkat pendidikan minimal Diploma.
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KKP Kelas I Makassar yang cukup memadai, namun terdapat beberapa Wilayah Kerja belum memiliki bangunan sendiri dan kendaraan operasional serta masih minimnya peralatan teknis.
- c. Anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan serta kesejahteraan pegawai yang teranggarkan di dalam RKA-K/L tahun 2023 serta adanya revisi Anggaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan.
- d. Beberapa jenis layanan yang ada di KKP Kelas I Makassar telah tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Keterbatasan jumlah ASN dan jenis jabatan fungsional tertentu di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar sehingga pekerjaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Teknis tertentu.
- b. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga pintu negara, terhadap pelaku perjalanan selama pandemi Covid 19 KKP Kelas I

Makassar kekurangan tenaga dalam hal pengawasan.

- c. Sumber pendanaan kegiatan teknis sebagian besar bersumber dari PNBK, sehingga pelaksanaan kegiatan tergantung dari pendapatan.
- d. Beberapa wilker belum memiliki bangunan sendiri, sehingga jenis pelayanan yang diberikan masih terbatas.

3. *Oppurtunity* (Peluang)

- a. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN KKP Kelas I Makassar setiap tahunnya.
- b. Terjalannya koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang sangat baik sebagai penunjang kegiatan KKP Kelas I Makassar.
- c. Tersedianya sarana teknologi informasi yang ada sebagai alat penunjang dalam pelaksanaan kegiatan.

4. *Threat* (Ancaman)

- a. Banyaknya penyakit baru yang muncul yang belum diketahui etiologi.
- b. Trend masyarakat untuk memilih jenis vaksin Covid-19 tertentu.
- c. Regulasi yang sering berubah-ubah tanpa dilakukan sosialisasi sebelumnya.
- d. Banyaknya klinik vaksinasi swasta yang melaksanakan vaksinasi internasional, sehingga potensi layanan tidak sesuai prosedur.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP bertugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

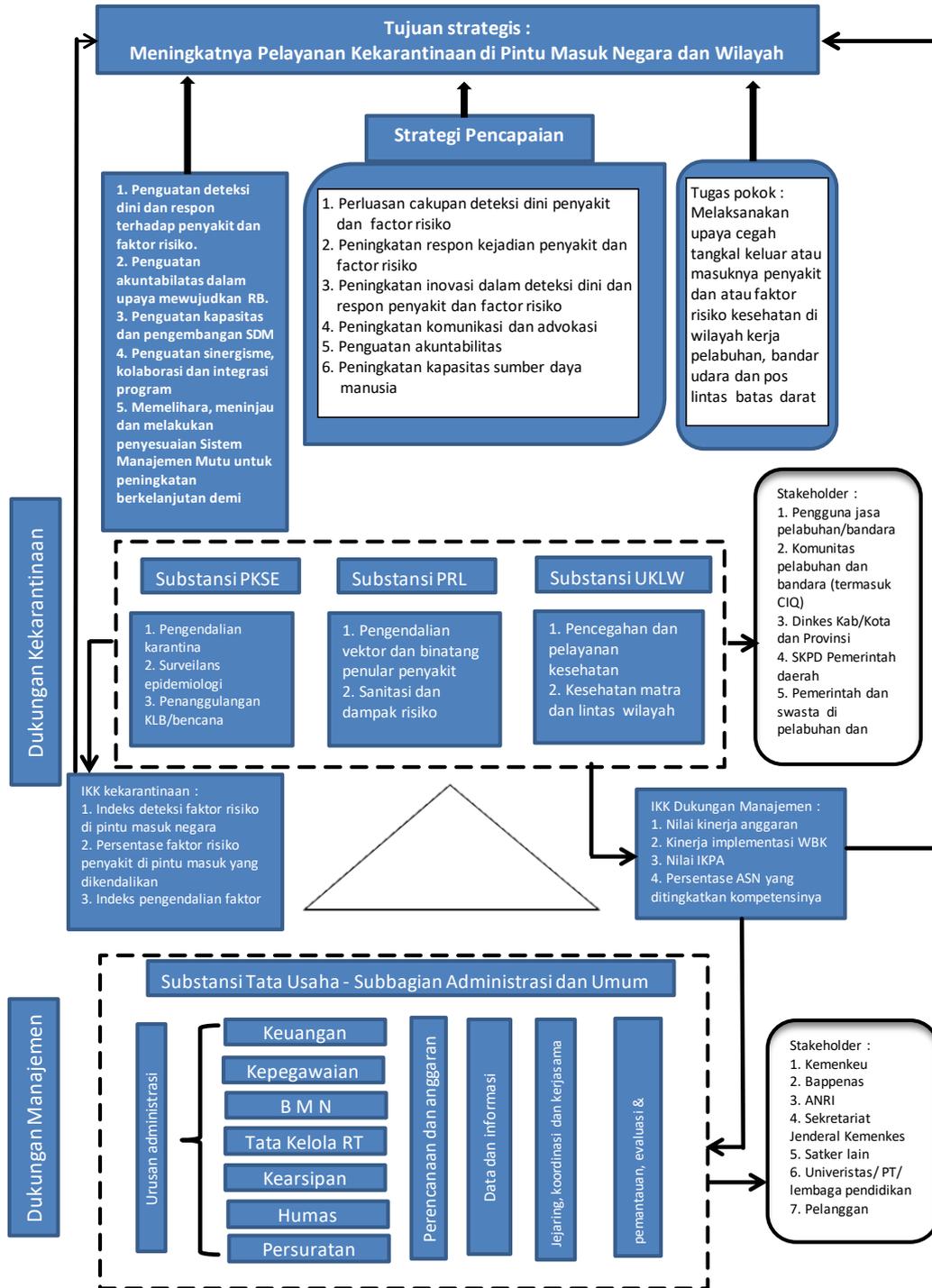
Dalam melaksanakan tugas tersebut, KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Berdasarkan tupoksi di atas, gambar I.1 di bawah ini menggambarkan hubungan keterkaitan tupoksi KKP dengan tugas dan fungsi setiap substansi yang ada di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023.

ANALISA CROSCUTTING KKP KELAS I MAKASSAR TAHUN 2023



Gambar I.1
Analisa Crosscutting KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar menjabarkan visinya yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pemberdayaan GERMAS;
5. Memperkuat sistem kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni :

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi yakni :

1. **Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
2. **Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;**
3. **Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
4. **Peningkatan Sumber Data Manusia.**

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 yakni :

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP Kelas I Makassar telah menetapkan tujuan strategisnya yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni :

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit;
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV;
3. Menurunnya Insiden TBC;
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria;
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta;
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun;

8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun;
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat;
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium;
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah;
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat;
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni **Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024**. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP Kelas I Makassar pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan. Sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 terdapat penambahan 2 indikator dalam Perjanjian Kinerja yaitu indicator Persentase Realisasi Anggaran dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel II.1. Indikator KKP Tahun 2020-2024

No.	Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Indikator Tahun 2023-2024 (revisi Februari 2023)
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
2	Persentase faktor	Persentase faktor	Persentase faktor

No.	Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Indikator Tahun 2023-2024 (revisi Februari 2023)
	risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
8			Persentase Realisasi Anggaran
9			Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti

Penjelasan masing-masing indikator akan dijelaskan di bawah ini :

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

Nilai kinerja anggaran merupakan *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan aplikasi **SMART**. Variabel yang diukur yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Persentase Realisasi Anggaran

Jumlah realisasi anggaran belanja yang digunakan KKP Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Tahun 2023.

Persentase realisasi anggaran KKP Kelas I Makassar Tahun 2023 diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan RI.

9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Kemenkes dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan

kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP Kelas I Makassar telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan KKP Kelas I Makassar tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

1. Indikator indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor dan lintas program
- b. Melaksanakan sosialisasi regulasi terkait kekarantinaan kesehatan yang intens kepada LP/LS serta masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam deteksi faktor risiko di pintu masuk negara
- d. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengawasan pelaku perjalanan sesuai dengan regulasi yang berlaku

2. Indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program
- b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS
- c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko

3. Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program
- b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS serta memperkuat jejaring yang terlibat dalam pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

- c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko

4. Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran
- b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelaksanaan anggaran
- c. Mengisi aplikasi e-Monev SMART DJA sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja anggaran KKP Kelas I Makassar

5. Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan memonitoring kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan
- b. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantun dalam halaman III DIPA
- c. Memaksimalkan realisasi anggaran sehingga menghasilkan capaian output yang maksimal.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output

6. Indikator Kinerja implementasi WBK satker

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas
- b. Monitoring dan evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas
- c. Melakukan self assessment terhadap capaian pembangunan zona integritas
- d. Meningkatkan sistem pengendalian internal
- e. Membuat inoasi terkait pelayanan publik

7. Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Penyertaan pegawai dalam peningkatan kompetensi melalui diklat, seminar, workshop, *in house training*, dan semacamnya.
- b. Koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan instansi diklat

- c. Menyusun *Training Need Analysis*, serta melakukan monev terhadap hasil pelaksanaan TNA

8. Indikator Persentase Realisasi Anggaran

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala untuk melihat progress dari masing-masing kegiatan
- b.

9. Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti

Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan BPK sebelum disampaikan kepada Pusat
- b. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK.

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

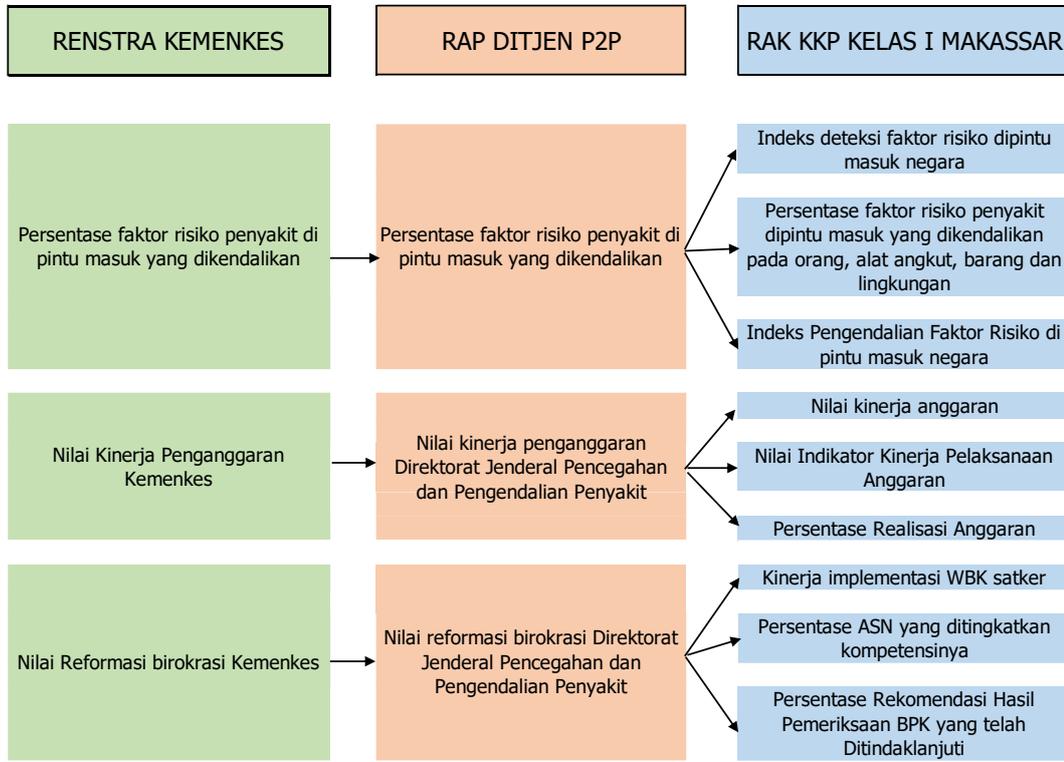
Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan yang didukung dengan komponen-komponen yang saling berkaitan, maka kerangka logis KKP Kelas I Makassar dapat terlihat dalam gambar III.1 di bawah ini.



Gambar III.1 Kerangka Logis Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

Rencana strategis Kemenkes yang sejalan dengan RAP Ditjen P2P dan RAK KKP Kelas I Makassar dapat dilihat dalam diagram Cascading IKP dan IKK KKP Kelas I Makassar pada gambar III.2.

DIAGRAM CASCADING IKP DAN IKK KKP KELAS I MAKASSAR TAHUN 2023



Gambar III.2
Diagram Cascading IKP dan IKK KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

B. Rencana Kegiatan

1. Target Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan oleh KKP Kelas I Makassar tahun 2022 sd. 2024 dapat dilihat dalam tabel III.1.

Tabel III.1
Target Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2022 sd 2024

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah			
1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	1	1	1
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,96	0,96	0,96
4. Nilai kinerja anggaran	85	85	85
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93	93
6. Kinerja implementasi WBK satker	81	81	81
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	80%	85%
8. Persentase Realisasi Anggaran			95%
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti			92,5%

2. Kegiatan

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu :

- a. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dan Konsultasi Petugas Wilker ke Induk;
 - 2) Pertemuan Koordinasi dan sosialisasi Program Pengendalian Vektor dan BPP
 - 3) Pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan embarkasi/Debarkasi
 - 4) Monitoring/ Bimbingan Teknis /Asistensi Ke Wilayah Kerja
 - 5) Konsultasi Pelaksanaan Program PP ke Pusat
 - 6) Pertemuan/koordinasi LP/LS program karkes dan kespel
 - 7) Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji
 - 8) Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji
 - 9) Surveilans Kesehatan Haji Pasca Debarkasi
 - 10) Evaluasi Pelayanan Kesehatan Embarkasi Debarkasi Haji
 - 11) Verifikasi dan pengawasan terhadap klinik dan Rumah sakit yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional
 - 12) Rapat Koordinasi/Pelatihan bagi klinik dan Rumah Sakit pelaksanaan pelayanan Vaksinasi internasional dan penerbitan ICV
 - 13) Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja

- 14) Evaluasi Hasil Deteksi Dini HIV-AIDS dan TB dan Pertemuan jejaring lintas sektor lintas program
- 15) Deteksi dini penyakit TB di Wilayah Kerja Pelabuhan / Bandara
- 16) Mobile Vaksinasi
- 17) Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja
- 18) Pelaksanaan Pra Embarkasi
- 19) Pengawasan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Makanan dan Minuman
- 20) Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut
- 21) Pemeriksaan Kekekarantinaan Alat Angkut
- 22) Tindakan Penyehatan Alat Angkut/Lingkungan
- 23) Pengawasan Pelaku Perjalanan (Relawan)
- 24) Tracing bagi pelaku perjalanan
- 25) Testing/skrining/pemeriksaan Covid-19
- 26) Penguatan layanan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan melalui Sinkarkes
- 27) Pengawasan OMKABA
- 28) Pendampingan pelaksanaan surveilans migrasi malaria
- 29) Penyuluhan/Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan
- 30) Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara
- 31) Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit HIV AIDS
- 32) Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit TB
- 33) Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (SBK)

b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan Kesehatan
- 2) Layanan Pengendalian Faktor risiko pada alat angkut, orang dan barang
- 3) Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB / Penyelidikan Epidemiologi
- 4) Pemusnahan Limbah Medis

- c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional praembarkasi haji
 - 2) Pelaksanaan Walk Through Survey (WTS) Faktor Risiko di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi COVID-
 - 3) Pengawasan sanitasi bangunan/gedung/perkantoran/industri/TTU/TPM
 - 4) Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Air/Udara
 - 5) Kursus Penjamah Makanan
 - 6) Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan
 - 7) Uji Resistensi / Efikasi Insektisida
 - 8) Pengawasan faktor risiko dalam rangka arus mudik
 - 9) Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilker Pelabuhan Bira (Bulukumba)
 - 10) Table Top Exercise di Pelabuhan Parepare
 - 11) Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis
 - 12) Penyusunan Rencana Kontinjensi/Simulasi
 - 13) Distribusi vaksin/alat/bahan/perbekkes/blangko pemeriksaan
 - 14) Penambah Daya Tahan Tubuh
 - 15) Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Pelabuhan Bira Bulukumba
 - 16) pengendalian vektor DBD
 - 17) Pemetaan
 - 18) Pemasangan Perangkap
 - 19) Identifikasi Tikus dan Pinjal
 - 20) pengendalian vektor Diare
 - 21) Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit DBD
 - 22) Survei jentik (SBK)
 - 23) Survei nyamuk (SBK)
 - 24) pengendalian vektor Diare

d. Nilai kinerja anggaran

- 1) Pertemuan/Konsultasi Perencanaan Program
- 2) Koordinasi Perencanaan Program
- 3) Pertemuan/Konsultasi Evaluasi Program
- 4) Pertemuan/Konsultasi Keuangan BMN dan Anggaran
- 5) Pertemuan/Konsultasi Terkait Hukum dan Organisasi
- 6) Pertemuan/Konsultasi Terkait Kepegawaian dan Umum
- 7) Penyusunan RKA-K/L
- 8) Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran
- 9) Penyusunan erenggar
- 10) Pertemuan/ Konsultasi pengelolaan/Pelaporan PNPB
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan program
- 12) Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran
- 13) Penyusunan Laporan E Monev Bappenas/PP. tahun
- 14) Penyusunan Laporan Tahunan satker
- 15) Penyusunan laporan indikator RAK
- 16) Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
- 17) Evaluasi SAKIP

e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- 1) Perlengkapan Pengendalian Faktor Risiko
- 2) Bahan dan kelengkapan pengendalian vector
- 3) Penyediaan Bahan Kesehatan
- 4) Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai
- 5) Pengadaan Rambu K3 Untuk Gedung Wilker
- 6) Bahan dan kelengkapan lab sanitasi
- 7) Pengadaan Bahan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan
- 8) Pengadaan perangkat pengolah data untuk penerbitan dokumen online
- 9) Pengelolaan BMN
- 10) Penyusunan RKBMN
- 11) Penghapusan dan Pemusnahan BMN

- 12) Kaliberasi Alat Kesehatan
- 13) Desiminasi Informasi melalui media KIE
- 14) Layanan Humas
- 15) Pameran Bidang Kesehatan
- 16) Pengelolaan Rumah Tangga
- 17) Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 18) Penyusunan profil
- 19) Pembayaran gaji dan tunjangan
- 20) Belanja keperluan sehari-hari perkantoran
- 21) Pemeliharaan gedung dan bangunan
- 22) Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor
- 23) Pemeliharaan dan Operasional kendaraan R4
- 24) Pemeliharaan dan operasional kendaraan R2
- 25) Perbaikan peralatan fungsional
- 26) Langganan daya dan jasa
- 27) Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- 28) Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja
- 29) Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan cleaning service
- 30) Sewa gedung/kantor/wilker
- 31) Sewa rumah jabatan
- 32) Kalibrasi alat-alat Kesehatan
- 33) Pas pelabuhan/bandara
- 34) Kebersihan kantor
- 35) Sewa Mesin Fotocopy
- 36) Pemeriksaan Kesehatan ASN
- 37) Langganan Internet Service Provider
- 38) Sewa kendaraan operasional
- 39) Operasional Kendaraan Sewa
- 40) Langganan Aplikasi Meeting
- 41) Pengangkutan Sampah
- 42) Optimasi Media Informasi
- 43) Perpanjangan domain website
- 44) Peralatan dan fasilitas perkantoran

- 45) Pengadaan kendaraan bermotor
 - 46) Pengadaan Tanah Wilker Biringkassi
 - 47) Pembangunan Tempat wudhu Musholla kantor Induk dan koridor
 - 48) Pengadaan Landscape dan Fasilitas Penunjang di Wilker Bajoe
 - 49) Penyusunan Laporan Keuangan
 - 50) Penyusunan Laporan Keuangan Komprehensif
 - 51) Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E- Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun dan Semester I TA
 - 52) Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPNBP
 - 53) Koordinasi Pengelolaan PNBPNBP
 - 54) Pencairan Anggaran dan Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U)
 - 55) Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
 - 56) Konsultasi Kearsipan
 - 57) Bimtek/Monev kearsipan
- f. Kinerja implementasi WBK satker
- 1) Pelayanan Hukum
 - 2) Layanan Organisasi Tatalaksana
- g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
1. Mengikuti Workshop / Simposium Surveilans Epidemiologi dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Petugas
 2. Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan
 3. Workshop/Simposium Travel Medicine/Aeromedicine
 4. Pelatihan EKG bagi Tenaga Dokter
 5. Pelatihan Kedaruratan Kesehatan
 6. Mengikuti pertemuan, Seminar, Kursus yang berhubungan dengan pengendalian vector
 7. Mengikuti Diklat/ Workshop / Seminar/ Simposium/ Temu Ilmiah dalam rangka peningkatan kompetensi bagi dokter, perawat, laboran, K3

8. Mengikuti Seminar/Kursus/Workshop terkait kekarantinaan Kesehatan
 9. Peningkatan Kompetensi
 10. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai
 11. Layanan Mutasi Kepegawaian
 12. Pelantikan/Sertijab/Sumpah PNS
- h. Persentase Realisasi Anggaran
1. Mengadakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per triwulan dengan mengundang semua pegawai KKP Kelas I Makassar.
 2. Monev realisasi capaian kinerja dan anggaran per bulan.
- i. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti
1. Mengadakan rapat membahas hasil temua pemeriksaan BPK.
 2. Menindaklanjuti sampai tuntas semua hasil pemeriksaan BPK.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang telah disusun berdasarkan Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2598/2020, tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan, meliputi 8 (delapan) proses bisnis yaitu :

1. Pengelolaan perencanaan dan anggaran program
2. Pengelolaan administrasi dan umum
3. Pengelolaan organisasi dan tata laksana
4. Pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa
5. Pengawasan kekarantinaan kesehatan
6. Pencegahan kekarantinaan kesehatan
7. Respon kekarantinaan kesehatan
8. Pengelolaan data dan informasi.

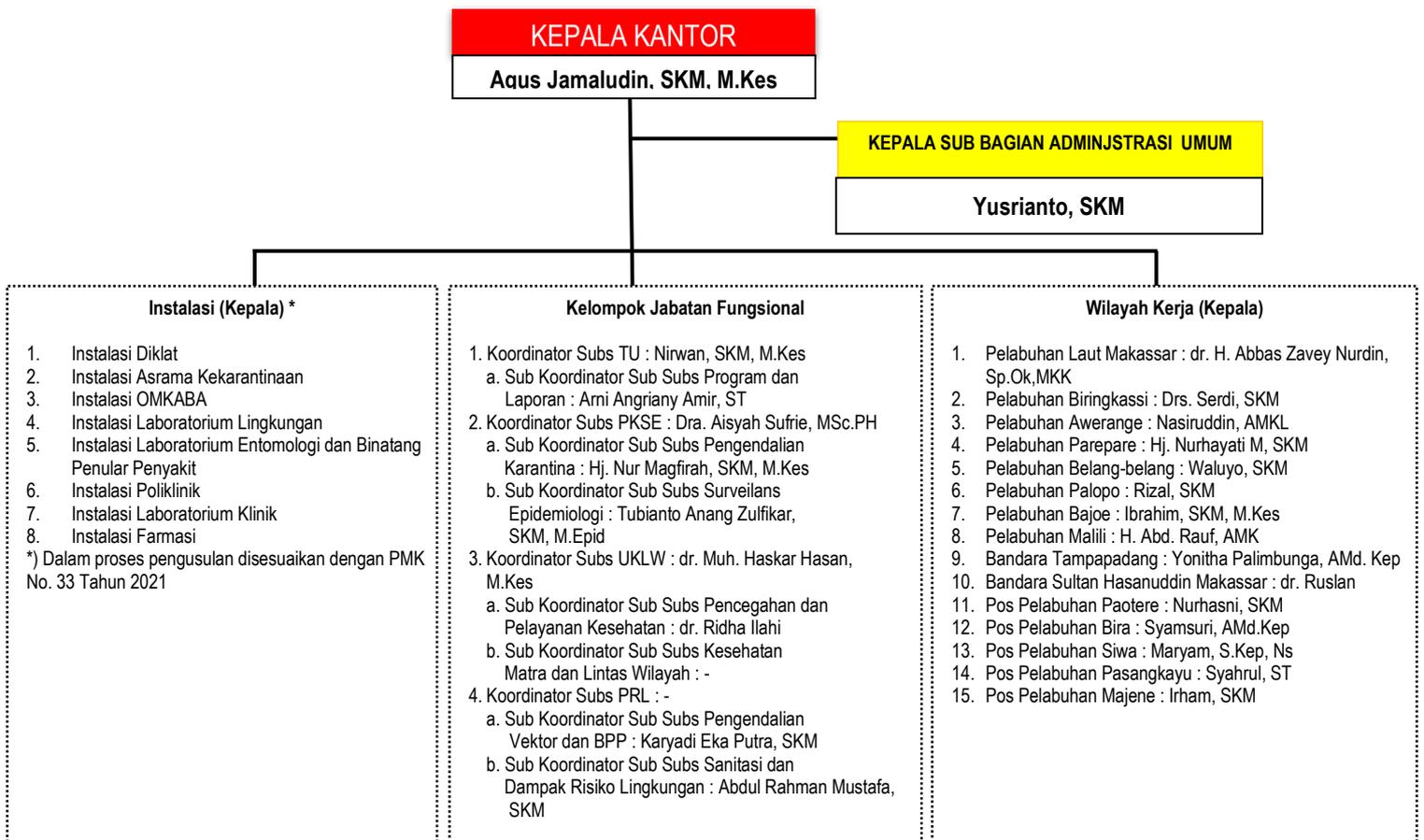
Berdasarkan peta proses bisnis maka disusunlah struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Administrasi Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok jabatan fungsional
5. Instalasi

Jabatan Kepala KKP Kelas I Makassar dijabat oleh Agus Jamaludin, SKM, M.,Kes sejak September 2022.

Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar III.3 berikut.



Gambar III.3
Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran Pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
2. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Permenkes 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
7. Permenkes 1501 tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangnya;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
9. Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan

Pendekatan Keluarga;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja KKP;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
19. Keputusan Menkes No.612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
20. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara;
21. SOP Prosedur Penyiapan Rencana Kegiatan dan Data Dukung Rencana Usulan RKA-K/L, Nomor OT.02.02/1.2/4250/2019;
22. SOP Prosedur Pengawasan International Certificate Vaccination, Nomor OT.02.02/3/4306/2019;
23. SOP Prosedur Penyusunan Laporan E Monev DJA, Nomor OT.02.02/1.2/4355/2019;
24. SOP Prosedur Penanganan Pesawat/Kapal Dalam Status Karantina, Nomor SR.01.07/2.1/2601/2020;
25. SOP Prosedur Deteksi Dini Penyakit Menular, Nomor OT.02.02/2.1/2760/2020;
26. SOP Prosedur Pengawasan Lalulintas Orang Sakit dan Penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang, Nomor OT.02.02/2.1/2764/2020;
27. SOP Prosedur Pengawasan Higiene Sanitasi Pesawat, Nomor OT.02.02/3/2775/2020;
28. SOP Prosedur Pengelolaan Vaksin, Nomor OT. 02.02/1.2/2804/2020;

29. SOP Pengawasan Kepadatan Kecoak di TPM Bandara/Pelabuhan, Nomor OT.02.02/3/2819/2020;
30. SOP Pengawasan Vektor di Pelabuhan/ Bandara, Nomor OT.02.02/3/2820/2020;
31. International Health Regulation Tahun 2005.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas I Makassar, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Kekearifinaan Kesehatan;
2. Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kekearifinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara;

E. Kerangka Pendanaan

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam mencapai target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, maka pendanaan yang digunakan bersumber dari APBN baik dari RM (Rupiah Murni) maupun PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kerangka pendanaan KKP Kelas I Makassar tahun 2022 sd 2024 dapat dilihat dalam tabel III.2.

Tabel III.2
Kerangka Pendanaan KKP Kelas I Makassar Tahun 2022 sd 2024

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)			Substansi Pelaksana
	2022	2023	2024	
Meningkatnya pelayanan kekearifinaan di pintu masuk negara dan wilayah	37.263.131	33.888.156	30.367.500	Tata Usaha, PKSE, UKLW, dan PRL
1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	5.316.162	4.034.657	3.499.350	PKSE, UKLW, dan PRL
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan	700.235	462.850	416.565	PKSE, UKLW, dan PRL

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan				
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	1.246.691	1.637.114.000	1.473.402	PKSE, dan PRL
4. Nilai kinerja anggaran	478.136	570.231	513.208	Tata Usaha
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	28.873.804	26.278.059	23.650.253	Tata Usaha
6. Kinerja implementasi WBK satker	129.353	88.513	79.663	Tata Usaha
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	518.750	816.732	735.059	Tata Usaha
8. Persentase Realisasi Anggaran		0	0	Tata Usaha
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti		0	0	Tata Usaha

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan agar dapat menyesuaikan keseluruhan proses kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pemantauan dimaksudkan agar mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut penyelesaiannya.

Untuk pemantauan dilakukan secara berkala setiap bulan dan triwulan. Proses pemantauan dapat melalui aplikasi :

1. Aplikasi pengukuran output dan kinerja anggaran yaitu e-Monev DJA dan e-Monev Bappenas
2. Aplikasi pengukuran nilai IKPA melalui OM SPAN dan SAKTI
3. Aplikasi pemantauan capaian kinerja bulanan yaitu e-Performance

B. Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap Indikator kinerja KKP Kelas I Makassar dilaksanakan setiap bulannya dalam rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini melibatkan Kepala Kantor, Kasubbag Administrasi dan Umum, para Koordinator dan Sub Koordinator Substansi dan pegawai KKP Kelas I Makassar.

Evaluasi pelaksanaan pengawasan pelaku perjalanan di Bandara dan Pelabuhan juga melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Otoritas Bandara/Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran, PT. Angkasa Pura I, PT. Pelni, Airlines, Agen Kapal serta Lintas Sektor Lintas Program terkait.

Dari hasil evaluasi dituangkan ke dalam laporan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), baik berupa permasalahan serta tindak lanjut dari

permasalahn tersebut, yang nantinya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja KKP Kelas I Makassar setiap tahunnya.

C. Pengendalian

Kepala KKP Kelas I Makassar sebagai pengendali dan bertanggung jawab serta terlibat secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pencapaian IKK.

Target Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon 1 dengan Kepala KKP Kelas I Makassar merupakan wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi. Untuk pemenuhan tersebut dibutuhkan pengendalian yang efektif dengan cara melakukan pemantauan dan monev untuk percepatan kegiatan dan realisasi anggaran yang tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas I Makassar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian masing-masing Kelompok Substansi di KKP Kelas I Makassar mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

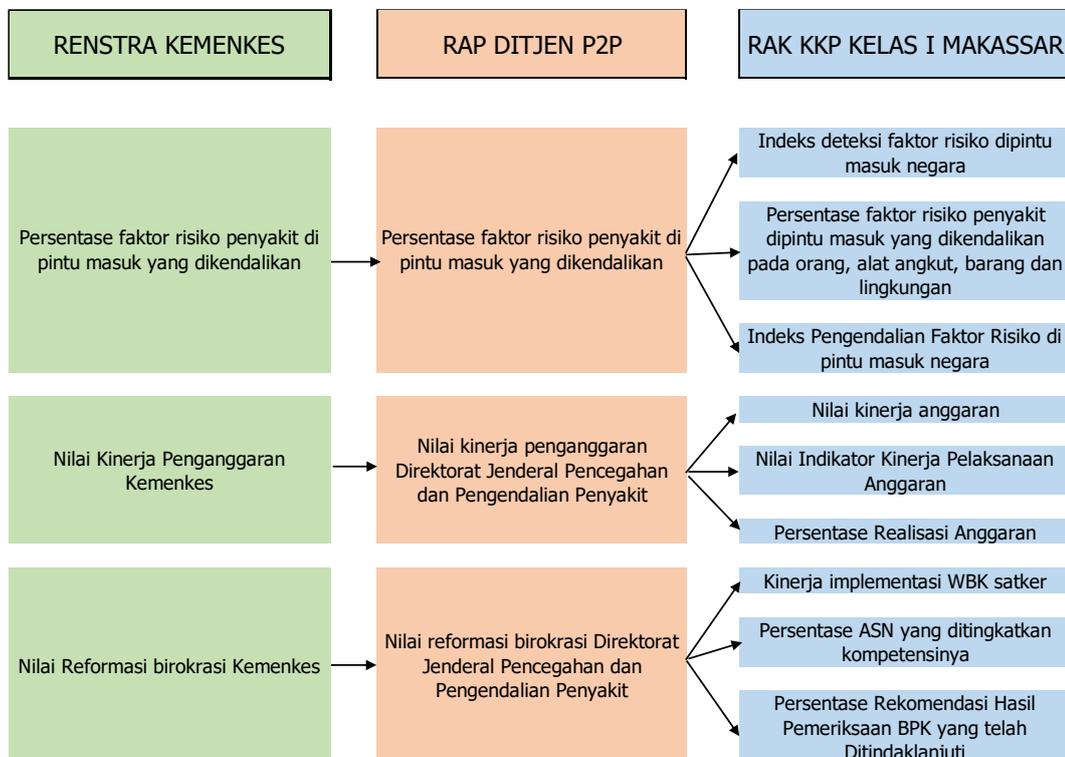
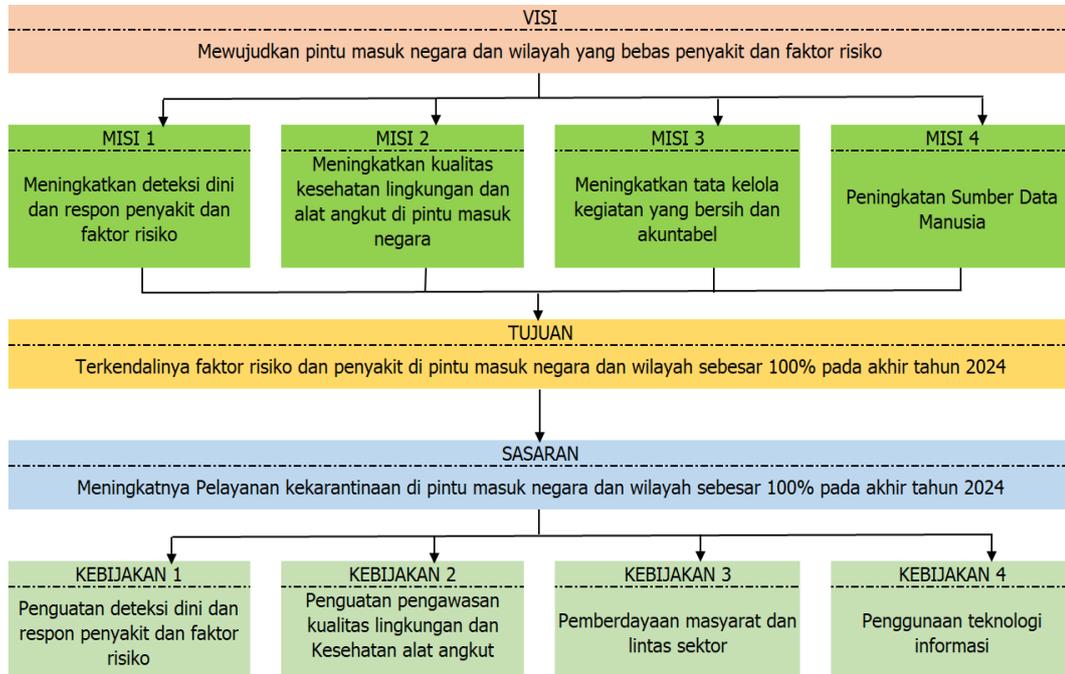
RAK ini juga mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi tengah periode (*midterm review*). Berdasarkan hasil reviu, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan (revisi) terhadap substansi dari RAK KKP Kelas I Makassar ini sesuai dengan perkembangan, tuntutan pelayanan dan dinamika pembangunan kesehatan. Revisi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas perubahan indikator pendukung program kegiatan P2P. Pada bulan Februari 2023 diadakan penambahan indicator sebanyak 2 (dua) infikator, sehingga yang awalnya KKP Kelas I Makassar dengan 7 (tujuh) menjadi 9 (Sembilan) indicator. Revisi indikator dalam RAK KKP Kelas I Makassar ini mengikuti indikator standar yang harus dicapai oleh semua Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai bentuk dukungan dan pertanggungjawaban kegiatan pada Ditjen P2P. Selain pertanggungjawaban kegiatan juga sebagai pertanggungjawaban terhadap realisasi anggaran yang diberikan.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMPPIRAN

Lampiran 1. Kerangka Logis Program



Lampiran 2.
Matriks Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Pendanaan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Revisi Desember 2021											
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3.722.715	2.652.728	5.003.048	5.753.505	6.616.531	2.938.296.000	6.526.618.000	7.701.409.240	8.856.620.626	10.185.113.720
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	97%	97%	153.734.000	562.344.000	663.565.920	763.100.808	877.565.929
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	95%	95%	95%	1.449.308.000	588.408.000	694.321.440	798.469.656	918.240.104
4	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	83	83	83	176.192.000	311.270.000	367.298.600	422.393.390	485.752.399
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93	93	93	93		23.049.248.000	27.083.543.880	31.146.075.462	35.817.986.781
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	70	80	80	80	80	5.485.586.000	209.060.000	246.690.800	283.694.420	326.248.583
7	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	70%	80%	80%	80%	218.618.000	266.484.000	314.451.120	361.618.788	415.861.606
Indikator Revisi Juli 2022											
1	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			1	1	1	2.938.296.000	6.526.618.000	5.316.162.000	5.413.916.000	6.226.003.000
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	153.734.000	562.344.000	700.235.000	712.979.000	819.926.000
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara			0,96	0,98	1	1.449.308.000	588.408.000	1.246.691.000	1.269.381.000	1.459.788.000
4	Nilai kinerja	80	83	85	86	86	176.192.000	311.270.000	478.136.000	486.838.000	559.864.000

	anggaran										
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93	93	93	93		23.049.248.000	28.873.804.000	29.401.001.000	33.811.151.000
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	5.485.586.000	209.060.000	129.353.000	131.708.000	151.464.000
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	70%	80%	80%	80%	218.618.000	266.484.000	518.750.000	528.200.000	607.430.000
Indikator Revisi November 2023											
1	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			1	1	1	2.938.296.000	6.526.618.000	5.316.162.000	4.034.657.000	3.499.350.000
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	153.734.000	562.344.000	700.235.000	462.850.000	416.565.000
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara			0,96	0,96	0,96	1.449.308.000	588.408.000	1.246.691.000	1.637.114.000	1.473.402.000
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85	176.192.000	311.270.000	478.136.000	570.231.000	513.208.000
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93	93	93	93		23.049.248.000	28.873.804.000	26.278.059.000	23.650.253.000
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	5.485.586.000	209.060.000	129.353.000	88.513.000	79.663.000
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	70%	80%	80%	85%	218.618.000	266.484.000	518.750.000	816.732.000	735.059.000
8	Persentase Realisasi Anggaran				95%	95%				0	0
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%	92,5%				0	0

Lampiran 3.
Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK
dan Sumber data

No.	Indikator	Definisi Operasional (DO)	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	Indeks pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal dikurangi skor minimal) dari pengukuran 4 parameter yakni : <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar b. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar c. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar d. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> a. Rekap laporan harian jumlah penumpang Luar Negeri dan Dalam Negeri b. Data kunjungan poliklinik bukan penumpang c. Laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja d. Pemeriksaan personil pesawat (termasuk ICV personil kedatangan) e. Laporan screening HIV, TB, malaria disekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang) f. Gendec terverifikasi (ttd/stempel) g. Ijin angkut jenazah h. Form inspeksi kesling TTU i. Form inspeksi kesling TPP j. Form inspeksi kesling ISPAB, air k. Rekapitulasi hasil survei vektor
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan penumpang dengan suhu tinggi >37,5 °C, dalam status karantina, Covid positif, sakit, saturasi <95, hamil >32 minggu, Hb <8.5, haji : hamil <14 minggu dan > 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan Wabah dan pengendaliannya b. Laporan penumpang belum vaksinasi MM atau YF (sesuai negara tujuan) dan laporan vaksinasi c. Laporan hasil screening positif HIV, TB, dan malaria dan rekomendasi d. Laporan penemuan vector kecoa, tikus, lalat, dan nyamuk pada pesawat dan pengendaliannya (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi) e. Laporan alat angkut yang membawa penumpang positif Covid atau penyakit KKM f. Laporan jenazah dengan penyakit menular dan potensial wabah (Meningitis, Covid, TB)

				<p>g. Laporan hasil tidak lanjut atas rekomendasi terhadap TTU, TPP, SPAB yang tidak Memenuhi Syarat</p> <p>h. Laporan tindakan pengendalian vektor</p>
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	<p>Nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal dikurang score minimal) sub indikator berikut :</p> <p>a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%</p> <p>b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1</p> <p>c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)</p> <p>d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2</p> <p>e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2</p> <p>f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0</p> <p>g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1</p> <p>h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan</p> <p>i. Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan</p> <p>j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi / bakteriologis</p>	<p>a. Laporan sinyal SKD KLB dan Bencana</p> <p>b. Laporan survei pinjal</p> <p>c. Laporan survei larva anopheles</p> <p>d. Laporan kepadatan kecoa</p> <p>e. Laporan kepadatan lalat</p> <p>f. Laporan HI perimeter</p> <p>g. Laporan HI buffer</p> <p>h. Laporan IKL TTU</p> <p>i. Laporan IKL TPP</p> <p>j. Laporan pemeriksaan air bersih</p>
4	Nilai Kinerja Anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi volume kegiatan/target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan/target indikator kegiatan	Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi e-monev DJA
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator. Perhitungan nilai IKPA dilakukan otomatis pada menu aplikasi OM SPAN	Nilai IKPA pada aplikasi OM SPAN
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self	Akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Implementasi WBK

		Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P		
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	a. Matriks peningkatan kapasitas ASN b. Sertifikat/surat tugas/lapora
8	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah realisasi anggaran belanja yang digunakan KKP Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Tahun 2023. Persentase realisasi anggaran KKP Kelas I Makassar Tahun 2023 diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan RI.	Pengukuran persentase realisasi anggaran dihitung berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja dibagi dengan jumlah keseluruhan pagu anggaran dikali 100%	Realisasi Anggaran dari aplikasi SAKTI
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Kemenkes dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK	Persentase dari hasil tindak lanjut yang dilaksanakan dari hasil pemeriksaan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabata BPK	Laporan TL LHP BPK yang telah ditindaklanjuti oleh KKP Kelas I Makassar.

Lampiran 4.
Matriks Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor dan lintas program Melaksanakan sosialisasi regulasi terkait kekarantinaan kesehatan yang intens kepada LP/LS serta masyarakat baik secara langsung maupun melalui media social Pemenuhan sarana dan prasarana dalam deteksi faktor risiko di pintu masuk negara Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengawasan pelaku perjalanan sesuai dengan regulasi yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Wilker Pelabuhan Parepare Wilker Pelabuhan Awerange Wilker Pelabuhan Biringkassi Wilker Pelabuhan Bajoe Wilker Pelabuhan Palopo Wilker Pelabuhan Malili Wilker Pelabuhan Belang-Belang Wilker Bandara Tamba Padang Pos Pelabuhan Bira Pos Pelabuhan Paotere Pos Pelabuhan Siwa Pos Pelabuhan Majene Pos Pelabuhan Mamuju 	Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Konsultasi Petugas Wilker ke Induk; Pertemuan Koordinasi dan sosialisasi Program Pengendalian Vektor dan BPP Pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan embarkasi/Debakasi Monitoring/ Bimbingan Teknis /Asistensi Ke Wilayah Kerja Konsultasi Pelaksanaan Program PP ke Pusat Pertemuan/koordinasi LP/LS program karkes dan kespel Rapat Koordinasi LS/LP Pendukung kegiatan G20 (dukungan kegiatan G20) Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji Pelayanan Kesehatan Debakasi Haji Surveilans Kesehatan Haji Pasca Debakasi Evaluasi Pelayanan Kesehatan Embarkasi Debakasi Haji Verifikasi dan pengawasan terhadap klinik dan Rumah sakit yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional Rapat Koordinasi/Pelatihan bagi klinik dan Rumah Sakit pelaksanaan pelayanan Vaksinasi internasional dan penerbitan ICV Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja Evaluasi Hasil Deteksi Dini HIV-AIDS dan TB dan Pertemuan jejaring lintas sektor lintas program Deteksi dini penyakit TB di Wilayah Kerja Pelabuhan/ Bandara Mobile Vaksinasi Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Pelaksanaan Pra Embarkasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Makanan dan Minuman Tindakan Penyehatan dan 	Th 2022 : 5.316.162 Th 2023 : 4.034.657 Th 2024 : 3.499.350

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					<p>pengawasan Desinfeksi pada kegiatan G20 (dukungan kegiatan G20)</p> <p>22. Pengawasan dan pengendalian faktor risiko penyakit tular vektor dan BPP pada kegiatan G20 (dukungan kegiatan G20)</p> <p>23. Pemeriksaan sampel dalam rangka Food Safety G20 (dukungan kegiatan G20)</p> <p>24. Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut</p> <p>25. Pemeriksaan Kekarantinaan Alat Angkut</p> <p>26. Tindakan Penyehatan Alat Angkut/Lingkungan</p> <p>27. Pengawasan Pelaku Perjalanan (Relawan)</p> <p>28. Tracing bagi pelaku perjalanan</p> <p>29. Testing/skrining/pemeriksaan Covid-19</p> <p>30. Penguatan layanan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan melalui Sinkarkes</p> <p>31. Pengawasan DMKABA</p> <p>32. Pendampingan pelaksanaan surveilans migrasi malaria</p> <p>33. Penyuluhan/Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan</p> <p>34. Pemeriksaan swab Antigen/PCR Delegasi G20 (dukungan kegiatan G20)</p> <p>35. Pengawasan Kesehatan dan pelaksanaan proses Delegasi G20 di hotel dan venue (dukungan kegiatan G20)</p> <p>36. Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara</p> <p>37. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV/AIDS</p> <p>38. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB</p> <p>39. Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (SBK)</p>	
	2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	<p>1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program</p> <p>2. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam</p>	<p>1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar</p> <p>2. Wilker Pelabuhan Parepare</p> <p>3. Wilker Pelabuhan Awerange</p> <p>4. Wilker Pelabuhan Biringkassi</p> <p>5. Wilker Pelabuhan Bajoe</p> <p>6. Wilker Pelabuhan</p>	<p>Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos</p> <p>Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos</p> <p>Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos</p>	<p>1. Kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan Kesehatan</p> <p>2. Layanan Pengendalian Faktor risiko pada alat angkut, orang dan barang</p> <p>3. Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB / Penyelidikan Epidemiologi Pemusnahan Limbah Medis</p>	<p>Th 2022 : 700.235</p> <p>Th 2023 : 462.850</p> <p>Th 2024 : 416.565</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		pengendalian faktor risiko	Palopo 7. Wilker Pelabuhan Malili 8. Wilker Pelabuhan Belang-Belang 9. Wilker Bandara Tampa Padang 10. Pos Pelabuhan Bira 11. Pos Pelabuhan Paotere 12. Pos Pelabuhan Siwa 13. Pos Pelabuhan Majene 14. Pos Pelabuhan Mamuju			
	3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program 2. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS serta memperkuat jejaring yang terlibat dalam pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko	1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 2. Wilker Pelabuhan Parepare 3. Wilker Pelabuhan Awerange 4. Wilker Pelabuhan Biringkassi 5. Wilker Pelabuhan Bajoe 6. Wilker Pelabuhan Palopo 7. Wilker Pelabuhan Malili 8. Wilker Pelabuhan Belang-Belang 9. Wilker Bandara Tampa Padang 10. Pos Pelabuhan Bira 11. Pos Pelabuhan Paotere 12. Pos Pelabuhan Siwa 13. Pos Pelabuhan Majene Pos Pelabuhan Mamuju	Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos	1. Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional praembarkasi haji 2. Pelaksanaan Walk Through Survey (WTS) Faktor Risiko di Tempat Kerja Selama Masa Pandemi COVID- 3. Pengawasan sanitasi bangunan/gedung/perkantoran/industri/TTU/TPM 4. Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Air/Udara 5. Kursus Penjamah Makanan 6. Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan 7. Uji Resistensi / Efikasi Insektisida 8. Pengawasan faktor risiko dalam rangka arus mudik 9. Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilker Pelabuhan Bira (Bulukumba) 10. Table Top Exercise di Pelabuhan Parepare 11. Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis 12. Penyusunan Rencana Kontinjensi/Simulasi 13. Distribusi vaksin/alat/bahan/perbekk es/blangko pemeriksaan 14. Penambah Daya Tahan Tubuh 15. Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Pelabuhan Bira Bulukumba 16. pengendalian vektor DBD 17. Pemetaan 18. Pemasangan Perangkap 19. Identifikasi Tikus dan Pinjal	Th 2022 : 1.246.691 Th 2023 : 1.637.114 Th 2024 : 1.473.402

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					20. pengendalian vektor Diare 21. Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit DBD 22. Survei jentik (SBK) 23. Survei nyamuk (SBK) 24. pengendalian vektor Diare	
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai Kinerja Anggaran	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran 2. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelaksanaan anggaran 3. Mengisi aplikasi e-Monev SMART DJA sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja anggaran KKP Kelas I Makassar	1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 2. Wilker Pelabuhan Parepare 3. Wilker Pelabuhan Awerange 4. Wilker Pelabuhan Biringkassi 5. Wilker Pelabuhan Bajoe 6. Wilker Pelabuhan Palopo 7. Wilker Pelabuhan Malili 8. Wilker Pelabuhan Belang-Belang 9. Wilker Bandara Tampa Padang 10. Pos Pelabuhan Bira 11. Pos Pelabuhan Paotere 12. Pos Pelabuhan Siwa 13. Pos Pelabuhan Majene Pos Pelabuhan Mamuju	Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos	1. Pertemuan/Konsultasi Perencanaan Program 2. Koordinasi Perencanaan Program 3. Pertemuan/Konsultasi Evaluasi Program 4. Pertemuan/Konsultasi Keuangan BMN dan Anggaran 5. Pertemuan/Konsultasi Terkait Hukum dan Organisasi 6. Pertemuan/Konsultasi Terkait Kepegawaian dan Umum 7. Penyusunan RKA-K/L 8. Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran 9. Penyusunan erenggar 10. Pertemuan/ Konsultasi pengelolaan/Pelaporan PNBK 11. Penyusunan laporan pelaksanaan program 12. Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran 13. Penyusunan Laporan E Monev Bappenas/PP. tahun 14. Penyusunan Laporan Tahunan satker 15. Penyusunan laporan indikator RAK 16. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja 17. Evaluasi SAKIP	Th 2022 : 478.136 Th 2023 : 570.231 Th 2024 : 513.208
	5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan memonitoring kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan 2. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantun	1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 2. Wilker Pelabuhan Parepare 3. Wilker Pelabuhan Awerange 4. Wilker Pelabuhan Biringkassi 5. Wilker Pelabuhan Bajoe 6. Wilker Pelabuhan Palopo 7. Wilker Pelabuhan Malili 8. Wilker Pelabuhan Belang-Belang 9. Wilker Bandara Tampa Padang	Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos	1. Perlengkapan Pengendalian Faktor Risiko 2. Bahan dan kelengkapan pengendalian vector 3. Penyediaan Bahan Kesehatan 4. Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai 5. Pengadaan Rambu K3 Untuk Gedung Wilker 6. Bahan dan kelengkapan lab sanitasi 7. Pengadaan Bahan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan 8. Pengadaan perangkat pengolah data untuk penerbitan dokumen online 9. Pengelolaan BMN	Th 2022 : 28.873.804 Th 2023 : 26.278.059 Th 2024 : 23.650.253

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		<p>dalam halaman III DIPA</p> <p>3. Memaksimalkan realisasi anggaran sehingga menghasilkan capaian output yang maksimal.</p> <p>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output</p>	<p>10. Pos Pelabuhan Bira</p> <p>11. Pos Pelabuhan Paotere</p> <p>12. Pos Pelabuhan Siwa</p> <p>13. Pos Pelabuhan Majene</p> <p>14. Pos Pelabuhan Mamuju</p>		<p>10. Penyusunan RKBMN</p> <p>11. Penghapusan dan Pemusnahan BMN</p> <p>12. Kalibrasi Alat Kesehatan</p> <p>13. Desiminasi Informasi melalui media KIE</p> <p>14. Layanan Humas</p> <p>15. Pameran Bidang Kesehatan</p> <p>16. Pengelolaan Rumah Tangga</p> <p>17. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>18. Penyusunan profil</p> <p>19. Pembayaran gaji dan tunjangan</p> <p>20. Belanja keperluan sehari-hari perkantoran</p> <p>21. Pemeliharaan gedung dan bangunan</p> <p>22. Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor</p> <p>23. Pemeliharaan dan Operasional kendaraan R4</p> <p>24. Pemeliharaan dan operasional kendaraan R2</p> <p>25. Perbaikan peralatan fungsional</p> <p>26. Langganan daya dan jasa</p> <p>27. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat</p> <p>28. Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja</p> <p>29. Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan cleaning service</p> <p>30. Sewa gedung/kantor/wilker</p> <p>31. Sewa rumah jabatan</p> <p>32. Kalibrasi alat-alat Kesehatan</p> <p>33. Pas pelabuhan/bandara</p> <p>34. Kebersihan kantor</p> <p>35. Sewa Mesin Fotocopy</p> <p>36. Pemeriksaan Kesehatan ASN</p> <p>37. Langganan Internet Service Provider</p> <p>38. Sewa kendaraan operasional</p> <p>39. Operasional Kendaraan Sewa</p> <p>40. Langganan Aplikasi Meeting</p> <p>41. Pengangkutan Sampah</p> <p>42. Optimasi Media Informasi</p> <p>43. Perpanjangan domain website</p> <p>44. Peralatan dan fasilitas perkantoran</p> <p>45. Pengadaan kendaraan bermotor</p> <p>46. Pengadaan Tanah Wilker Biringkassi</p> <p>47. Pembangunan Tempat wudhu Musholla kantor Induk dan koridor</p> <p>48. Pengadaan Landscape dan Fasilitas Penunjang di Wilker Bajoe</p>	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					49. Penyusunan Laporan Keuangan 50. Penyusunan Laporan Keuangan Komprehensif 51. Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E- Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun dan Semester I TA 52. Rekonsiliasi Pengelolaan PNB 53. Koordinasi Pengelolaan PNB 54. Pencairan Anggaran dan Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U) 55. Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan 56. Konsultasi Kearsipan 57. Bimtek/Monev kearsipan	
	6. Kinerja Implementasi WBK Satker	1. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas 2. Monitoring dan evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas 3. Melakukan self assessment terhadap capaian pembangunan zona integritas 4. Meningkatkan sistem pengendalian internal 5. Membuat invoasi terkait pelayanan public	1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 2. Wilker Pelabuhan Parepare 3. Wilker Pelabuhan Awerange 4. Wilker Pelabuhan Biringkassi 5. Wilker Pelabuhan Bajoe 6. Wilker Pelabuhan Palopo 7. Wilker Pelabuhan Malili 8. Wilker Pelabuhan Belang-Belang 9. Wilker Bandara Tamba Padang 10. Pos Pelabuhan Bira 11. Pos Pelabuhan Paotere 12. Pos Pelabuhan Siwa 13. Pos Pelabuhan Majene 14. Pos Pelabuhan Mamuju	Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos	1. Pelayanan Hukum 2. Layanan Organisasi Tatalaksana	Th 2022 : 129.353 Th 2023 : 88.513 Th 2024 : 79.663
	7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	1. Penyertaan pegawai dalam peningkatan kompetensi melalui diklat, seminar, workshop, <i>in house training</i> , dan sebagainya 2. Koordinasi dengan instansi Pembina	1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 2. Wilker Pelabuhan Parepare 3. Wilker Pelabuhan Awerange 4. Wilker Pelabuhan Biringkassi 5. Wilker Pelabuhan Bajoe	Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos	1. Mengikuti Workshop/Simposium Surveilans Epidemiologi dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Petugas 2. Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan 3. Workshop/Simposium Travel Medicine/Aeromedicine 4. Pelatihan EKG bagi Tenaga	Th 2022 : 518.750 Th 2023 : 816.732 Th 2024 : 735.059

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		jabatan fungsional dan instansi diklat 3. Menyusun <i>Training Need Analysis</i> , serta melakukan monev terhadap hasil pelaksanaan TNA	6. Wilker Pelabuhan Palopo 7. Wilker Pelabuhan Malili 8. Wilker Pelabuhan Belang-Belang 9. Wilker Bandara Tamba Padang 10. Pos Pelabuhan Bira 11. Pos Pelabuhan Paotere 12. Pos Pelabuhan Siwa 13. Pos Pelabuhan Majene 14. Pos Pelabuhan Mamuju		5. Dokter Pelatihan Kedaruratan Kesehatan 6. Mengikuti pertemuan, Seminar, Kursus yang berhubungan dengan pengendalian vector 7. Mengikuti Diklat/Workshop/Seminar/Simposium/Temu Ilmiah dalam rangka peningkatan kompetensi bagi dokter, perawat, laboran, K3 8. Mengikuti Seminar/Kursus/Workshop terkait kekarantinaan Kesehatan 9. Peningkatan Kompetensi 10. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai 11. Layanan Mutasi Kepegawaian 12. Pelantikan/Sertijab/Sumpah PNS	
	8. Persentase realisasi anggaran	1. Melaksanakan Monev triwulan terhadap progress kegiatan	1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 2. Wilker Pelabuhan Parepare 3. Wilker Pelabuhan Awerange 4. Wilker Pelabuhan Biringkassi 5. Wilker Pelabuhan Bajoe 6. Wilker Pelabuhan Palopo 7. Wilker Pelabuhan Malili 8. Wilker Pelabuhan Belang-Belang 9. Wilker Bandara Tamba Padang 10. Pos Pelabuhan Bira 11. Pos Pelabuhan Paotere 12. Pos Pelabuhan Siwa 13. Pos Pelabuhan Majene 14. Pos Pelabuhan Mamuju	Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos	1. Monev capaian kinerja dan realisasi anggaran TW I 2. Monev capaian kinerja dan realisasi anggaran TW II 3. Monev capaian kinerja dan realisasi anggaran TW III 4. capaian kinerja dan realisasi anggaran TW IV	0
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	1. TL LHP BPK	1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 2. Wilker Pelabuhan Parepare 3. Wilker Pelabuhan Awerange 4. Wilker Pelabuhan Biringkassi	Th 2022 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2023 : 9 Wilker, 5 Pos Th 2024 : 9 Wilker, 5 Pos	1. TL LHP BPK	0

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			5. Wilker Pelabuhan Bajoe 6. Wilker Pelabuhan Palopo 7. Wilker Pelabuhan Malili 8. Wilker Pelabuhan Belang-Belang 9. Wilker Bandara Tumpa Padang 10. Pos Pelabuhan Bira 11. Pos Pelabuhan Paotere 12. Pos Pelabuhan Siwa 13. Pos Pelabuhan Majene 14. Pos Pelabuhan Mamuju			